

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2010,"Hukum Perusahaan Indonesia",Bandung, Citra Aditya Bakti;

Aminuddin Ilmar, S.H.,M.H.,2012,"*Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*" (Cet I), Jakarta, Kencana Prenada Media Group;

Bagir Manan, 1995,"*Pertumbuhan dan Perkembangan Kosntitusi suatu Negara*", Bandung, Mandar Maju;

Chabib Soleh dan Heru Rocmansjah, 2010,"*Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*",Jakarta :Fokus Media;

Gunawan Widjaja, 2005,"Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan", jakarta, Raja Grafindo Persada;

Hamid Chalid, 2009,"Hak-Hak Asasi Manusia Atas Air: Studi Tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia, Disertasi Doktor Ilmu Hukum FH UI, Jakrata: Program pasca Sarjana Strata;

- I.C.Rai Widjaya, S.H.,M.A.2000,” Penanaman Modal”,  
Jakarta,PT Pradnya Paramita;
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006,”Penerapan Good  
Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak  
Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Jakarta, Prenada  
Media Group;
- IR. Purwadi,2002, “Penelitian tentang Strategi Pengembangan  
BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan  
Asli Daerah”,Surabaya : Balitbang Daerah Provinsi Jawa  
Timur;
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian  
Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka  
Pelajar;
- Munir Fuady,2003,”Perseroan Terbatas Paradigma Baru”,  
Bandung, Citra Aditya Bakti;
- Rachmadi Usman, 2004,”Dimensi HukumPerusahaan Perseroan  
Terbatas”, Bandung, PT. Alumni;
- Richad Burton Simatupang, 2007,”Aspek Hukum dala Bisnis,  
edisi Revisi, jakarta, Rineka Cipta;

Roni Hanittijo S, dan Rono Soemitro, 1984,"Masalah-masalah  
Sosiologi Hukum, Bandung, Sinar Baru;

Rudyanti Dorotea Tobing, 2015,"Aspek-aspek Hukum Bisnis  
Pengertian, Asas, Teori dan Praktik, Surabaya, Leks Bang  
Justitia;

Rustian Kamaluddin,"*Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam  
Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah*"

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada  
Akhir abad ke-20*, Alumni, Bandung;

Prof. Dr. Zainal Asikin, S.H., SU & Dr. L. Wira Pria Suhartana,  
S.H., M.H, 2016, " Pengantar Hukum Perusahaan",  
jakarta, Pranadamedia Group.

**Jurnal/Makalah/Website**

Ambar Budhisulistiyawati, Yudho Taruno Muryanto, Anjar Sri  
CN,2015,"Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik  
Daerah (BUMD) Persero Untuk Mewujudkan Prinsip Tata  
Kelola Perusahaan Yang Baik" (Jurnal Privat Law Vol.III  
No. 2 Juli-Desember 2015);

Dian Cahyaningrum, 2018,"Implikasi Bentuk Hukum BUMD  
Terhadap Pengelolaan BUMD", Jakarta, Pusat Penelitian

- Badan Keahlian DPR RI (Jurnal Negara Hukum: Vol. 9, No. 1 Juni 2018);
- Hasbullah F. Sjawie, 2017, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires, (Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017);
- I Ketut Mardjana, 2002, “*Corporate Governance* dan Privatisasi” (Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol 1, No. 2 Oktober-Desember 2002);
- Irfan Nurahman, 2015, “ Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang Sumber Daya Air, (Jurnal, Kajian Vol. 20 No. 2 Juni 2015);
- Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono, dan Hanif Nur Widhiyanti, 2017, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas yang tidak dilibatkan dalam proses Akuisisi”, (Jurnal, Yuridika, Vol. 32, No. 3, September 2017);
- Santi Puspitasari dan Utari Nindyaningrum, 2015, “ Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum.hlm. 46 (dalam

Jurnal Penelitian Hukum Volume 2, Nomor 1, Maret 2015  
Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada);

Yordan Gunawan dan M Arizka Wahyu, 2016,” Masa Depan hak  
Atas Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
85/PUU-XI/2013, hlm.115-116 (dalam Jurnal kajian  
Hukum, Vol. 1 No. 2 (2016) Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta);

Yudho Taruno Muryanto dan Djuwitayastuti, 2014,” Model  
Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam  
Rangkaian Mewujudkan Good Corporate Governance” (   
Jurnal, Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari-April 2014)

-----“*Alternatif Model Pengelolaan Badan Usaha Milik  
Daerah (BUMD) dalam Rangka Mewujudkan Good  
Corporate Governace*”, Jurnal, hlm. 4, Dikases 09 Mei  
2017;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 001-021-022/PUU-I/2003  
Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang  
Ketenagalistrikan;

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 Tentang  
Pembatalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.  
7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;

<http://andichairulfurqan.wordpress.com/tag/bumd/>, Chairil  
Furkon “*Badan Usaha Milik daerah Sudah rawan*” diakses  
09 Agustus 2018.

[www. Google.com,/Salamudin.com](http://www.google.com/Salamudin.com), Salamudin, Artikel  
“*Pengertian BUMN dan BUMD, Tujuan, Ciri, bentuk-  
bentuk dan Contoh BUMN, BUMD*”, diakses 03 November  
2018, Jam 11.11 WIB;

[www.google.com](http://www.google.com), BPK Provinsi Banten, Atikel”*Peran Badan  
Usaha Milik daerah Sebagai Salah satu Sumber  
Pendapatan Daerah*”, hal. 13-14. di akses 03 November  
2018, jam 11.20 WIB;

### **Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Replik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960  
Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974  
Tentang Pengairan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004  
Tentang Sumber Daya Air;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007  
Tentang Perseroan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007  
Tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015  
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017  
Tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 3  
Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.. 4  
Tahun 1990 Tentang Kerjasama Antar Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 38 Tahun 2015  
Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha  
Dalam Penyediaan Infrastruktur;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor.  
14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum  
Tirtanirmala Kota Yogyakarta.